

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil mempunyai berbagai keragaman. Keragaman itu menjadi karakteristik dan keunikan bangsa Indonesia, antara lain: geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi sosial masyarakat dan keragaman budaya di setiap daerah. Karakteristik budaya antardaerah harus dipelihara dan dikembangkan untuk menjaga kelestarian budaya bangsa.

Perkembangan kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK), menandai adanya arus globalisasi. Keterbukaan pemanfaatan kemajuan TIK dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Potensi sekolah dapat berkembang sesuai ciri khas dari satuan pendidikan tersebut. Kemajuan teknologi mampu mengangkat budaya lokal sebagai potensi sekolah menjadi unggulan lokal. Implikasinya dunia pendidikan dapat menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Pendidikan diselenggarakan sampai masyarakat di daerah-daerah. Penyelenggaraan pendidikan berbasis pada potensi peserta

didik dan potensi daerah dengan senantiasa tetap menjaga kualitas/mutu pendidikan.

Perkembangan modernisasi di bidang pendidikan yang amat penting dan strategis adalah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Pada tingkat individu, pendidikan membantu mengembangkan potensi diri menjadi manusia yang berakhlak mulia, berwatak, cerdas, dan kreatif. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak budi pekerti luhur, cerdas, kreatif dan memiliki jiwa kemandirian.

Sejalan hal tersebut di atas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan yuridis formal dalam dunia pendidikan telah memasukkan sebuah paradigma baru pendidikan yang mampu memperkaya kebudayaan Indonesia pada masa depan dan menjadikannya kekuatan pembangunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (2003:25) tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 2 mengamanatkan, “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. artinya konsep pendidikan dari satuan pendidikan dapat dikembangkan, dikelola sesuai potensi daerah dan peserta didik berbasis keunggulan lokal. Jika hal ini dapat diimplementasikan dengan baik, pendidikan dapat dikembangkan untuk mengubah nasib masyarakat lokal pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya di masa depan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan perlu direformasi sehingga mewujudkan pendidikan terpadu yang mencakup jalur, sistem, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, lokasi/wilayah, dan manajemen pendidikan. Keterpaduan pendidikan ini mengandung misi untuk menghasilkan SDM yang kuat dalam keimanan dan ketaqwaan, nilai-nilai moral serta kebangsaannya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kecakapan hidup. Secara fungsional pendidikan untuk mengembangkan diri, mampu hidup mandiri, berwirausaha dan membuka lapangan kerja, serta menjadi subjek yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan lokal, daerah, dan nasional.

Pengembangan kurikulum perlu untuk diadakan, pusat kurikulum dan perbukuan diberi amanat untuk melakukan penyempurnaan kurikulum. Sejak tahun 2006 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, mulai dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Harapannya kurikulum pendidikan mampu menyerap substansi materi dari potensi yang ada di daerah.

KTSP merupakan kurikulum operasional yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan merupakan jawaban berbagai tantangan kehidupan pada abad ke-21. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (2003:25) tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pada pasal 36 ayat 2 dan 3 sebagai berikut.

- 1) “Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”.
- 2) “Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan”.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berisi beberapa pasal, yang dijelaskan pada pasal 77 a ayat 1 menyebutkan bahwa “kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan”. Lebih lanjut dalam pasal 77 a ayat 2 menyebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai berikut.

- a) Acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional.
- b) Acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah.
- c) Pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Berdasarkan implementasi regulasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Program pendidikan pada satuan pendidikan mengacu pada pengembangan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kondisi dan ciri khas potensi yang ada di daerah dan peserta didik atau dengan kata lain pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Oleh karena itu, sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan yang memiliki berbagai keragaman, kondisi lingkungan yang berbeda dengan lainnya. Sekolah dituntut untuk mendesain kurikulum pendidikannya sesuai prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum akan bersifat lebih dinamis dan kreatif serta berkualitas dalam menjawab perkembangan, tantangan dan tuntutan jaman.

Menurut H.A.R. Tilaar (2004:31) menjelaskan bahwa “peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka otonomi daerah merubah arah dan paradigma penyelenggaraan yang dulunya dengan pola sentralisasi ke arah pendidikan yang desentralisasi”. Adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi, menuntut adanya pengembangan kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam buku Bimtek Implementasi KTSP – SMK dari Depdiknas (2008:3) dijelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, sebagai berikut.

“(1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) Beragam dan terpadu, (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5)

Menyeluruh dan berkesinambungan, (6) Belajar sepanjang hayat, (7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah”.

Mars dan Mulyasa (2002:94) mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat dan dukungan internal dari dalam guru sendiri. Perlu diingat bahwa, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Adapun konsep model pengelolaan sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang sesuai dengan paradigma desentralisasi dewasa ini adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School Based Management* . Konsep pendekatan MBS dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. Menurut Nurkolis (2003: 81), “pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area. Pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi”. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan sekolah sangat ditentukan oleh pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Kondisi di lapangan masih menunjukkan bahwa ada beberapa institusi pendidikan dalam pengelolaan sekolah belum secara maksimal. Ini

dibuktikan pengembangan kurikulum sekolah yang belum mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Disamping itu, standar pelayanan minimal berbasis pada manajemen sekolah belum terpenuhi.

Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab diantaranya; SDM rendah, sarana dan prasarana kurang, serta pendanaan yang terbatas. Kurang adanya perhatian khusus, terhadap sekolah dan peserta didik menurut bakat, minat, dan potensi pengembangan unggulan lokal dari pemerintah. Akhirnya, sekolah akan menghasilkan output dan outcome yang rendah kualitas, kurang mandiri, serta tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan visi misi dari satuan pendidikan.

Kondisi seperti ini, diharapkan adanya strategi alternatif yang dapat dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah, khususnya pengembangan sekolah berbasis pada keunggulan lokal. Diantaranya, pengelolaan sekolahnya, pengembangan kurikulumnya dan adanya daya dukung lingkungan sekolah. Sejalan dengan konteks diatas, SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta adalah salah satu sekolah menengah dari tujuh sekolah menengah kejuruan berbasis seni pertunjukan yang ada di Indonesia. Disamping itu, pengelolaan dan pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal. Dalam hal ini, peneliti mengamati ada beberapa hal yang belum maksimal dalam pengembangan sekolah vokasi yang berbasis keunggulan lokal tersebut. Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti akan mengadakan penelitian tentang pengelolaan sekolah berbasis keunggulan lokal yang dikembangkan di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta. Harapannya

penelitian ini adalah memberikan dampak hasil maksimal untuk pengembangan manajemen sekolah berkeunggulan lokal dalam usaha pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini, “Bagaimanakah pengelolaan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 Surakarta ?” Fokus tersebut dirinci menjadi 3 subfokus sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta?
3. Bagaimana evaluasi dan pengawasan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yang akan dicapai.

1. Mendeskripsikan perencanaan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta.
3. Mendeskripsikan evaluasi dan pengawasan sekolah berbasis keunggulan lokal di SMK Negeri 8 (SMKI) Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini ada 2, secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai guna dalam peningkatan kualitas pendidikan dari segi pengelolaan sekolah berbasis keunggulan lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dinas pendidikan, sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan untuk sekolah berbasis keunggulan lokal.
- b. Bagi SMK Negeri 8 Surakarta, sebagai gambaran dalam peningkatan kualitas pengelolaan sekolah berbasis keunggulan lokal dengan potensi konservasi budaya bangsa.
- c. Bagi guru sebagai tenaga pengelola pendidikan, dapat memberikan kontribusi positif dan bahan masukan dalam rangka meningkatkan program pembelajaran.
- d. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah.